

Bupati Barito Kuala sampaikan LPJK Tahun 2009

Marabahan, KP - Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2007, pada setiap akhir tahun anggaran, bupati selaku kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah (nasional), Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPj) kepala daerah kepada DPRD dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, kepada masyarakat.

Sebagai perwujudan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Bupati Batola H Hasanuddin Murad, Selasa (23/4), dihadapan DPRD setempat, memberikan penjelasan atas LKPj khususnya terkait dengan hasil capaian kinerja dari aktifitas Pemkab Batola selama tahun 2009, selaku kepala daerah.

Lebih

jauh dijelaskan Bupati Hasan, tahun 2009, sebagai tahun kedua dari lima tahun periode pemerintahan yang harus dijalankannya, seperti halnya posisi "hasil kinerja" dari rencana kerja pemerintah daerah tahun 2008, maka "hasil kinerja" di tahun 2009 merupakan "indikator" yang menunjukkan perlakuan pembangunan yang telah mulai menemukan bentuknya yang tepat, dalam mewujudkan visi dan misi Pemkab Batola.

Kenyataan

ini ditandai dengan hal-hal berikut, pertama, Alhamdulillah sebelum APBD Batola tahun 2009 ditetapkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2007–2012 telah disahnya dan dilegalisasikan melalui Perda nomor 35 tahun 2008. Dengan demikian, cakupan kebijakan umum anggaran yang disampaikan Pemkab Batola pada tanggal 15 September 2008, yang selanjutnya menjadi kerangka utama perencanaan kinerja pemerintah daerah tahun 2009, memperoleh pijakan kuat, guna kesinambungan dan konsistensi keberlangsungannya, dalam upaya merealisasikan visi yang telah diamanatkan dalam "RPJM" dimaksud, yakni : `Terwujudnya Kabupaten Batola sebagai sentra produksi pertanian yang maju dan berdaya saing tinggi menuju terciptanya kemandirian daerah.

Kemudian yang

kedua, dengan telah disahkannya RPJM Pemkab Batola saat itu, maka "prioritas" pembangunan tahun 2009, secara substansional telah menjadi lebih pasti ruang lingkupnya, dan prioritas ini akan sama untuk setiap tahunnya hingga tahun 2012. Prioritas pembangunan dimaksud adalah 11 sasaran pembangunan sebagai termaktup pada bab 6, buku RPJM tahun 2007–2012.

Sedangkan yang membedakan sasaran pembangunan tahun 2009, dengan tahun-tahun berikutnya adalah skala prioritas atas program-kegiatan, serta volume per program kegiatan, yang disesuaikan dengan keberadaan faktor-faktor lingkungan strategis tahun yang bersangkutan. ``Hal ini, merupakan konsekuensi dari kenyataan yang telah kita sepakati, bahwa RPJM adalah rencana kinerja pembangunan yang terukur untuk lima tahunan, yang realisasinya diproyeksikan setiap kurun waktu tahunan, dalam jangka waktu yang bersangkutan,’’ terang bupati.

``Dari kedua kenyataan sebagaimana saya sampaikan, prioritas pembangunan tahun 2009 secara nomenklatur sedikit berbeda dengan prioritas pembangunan tahun 2008, walaupun secara substansi tetap sama. Prioritas pembangunan tahun 2009 mencakup 11 sasaran pembangunan RPJM sehingga lebih rinci jika dibandingkan dengan prioritas pembangunan tahun 2008 yang saat itu hanya mencakup delapan butir sasaran,’’ demikian Hasan. (K-6)